

## KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Agustina Setiawan<sup>1</sup>

Widuri Wulandari<sup>2</sup>

Siti Munawaroh<sup>3</sup>

Universitas Jenderal Achmad Yani<sup>1,2,3</sup>

Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat<sup>1,2,3</sup>

Alamat email Koresponden: [widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id](mailto:widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyse the capacity of village government in the development of tourism villages in Cimanggu Village, Ngamprah Sub-district, West Bandung Regency. Cimanggu Village has tourism potential, one of which is hot springs. However, this tourism potential has not been developed optimally. The village government has not been able to develop its own tourism village. Not many people know the attractions in Cimanggu Village. Data collection in this study was carried out by means of interviews, documentation and observation. The research was conducted for approximately 5 months. The results of this study indicate that the capacity of Cimanggu Village Government in the development of tourist villages has not run optimally. This can be seen from the joint commitment between the Village Government and the community through the formation of Pokdarwis; Leadership of the Cimanggu Village Head is good; Regulatory Reform in the Cimanggu Village Government relating to tourist villages does not yet exist; Institutional Reform is the formation of Pokdarwis; The strength of the Cimanggu Village community involvement in the development of tourist attractions while for weaknesses there needs to be joint seriousness between Pokdarwis, Cimanggu Village Government and West Bandung Regency Government to develop the tourism potential in Cimanggu Village, especially in terms of promotion and funding.*

**Keywords:** Capacity, Government, Tourism Village

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui peraturan ini desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aturan ini juga mengharapkan agar desa menjadi mandiri dalam mengelola pemerintahan dan mengelola potensi yang dimiliki masing-masing desa yang ada di Indonesia. Salah

satu kebebasan yang diberikan ke desa adalah mengurus keuangan desa. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di Desa.

Pemerintah Desa harus dapat menggali potensi ekonomi, salah satunya bidang Pariwisata. Desa sangat kental sekali berkaitan dengan budaya lokal yang secara turun temurun diturunkan oleh nenek moyang. Nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat perdesaan tentunya berkaitan erat dengan tatanan atau struktur dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan norma yang ada. Namun di era modern saat ini ternyata menimbulkan degradasi nilai yang berkembang di masyarakat perdesaan (Wardani and Riyadi, 2020).

Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah untuk dikembangkan jadi daya tarik wisata baru. Namun menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat ada 16 desa wisata yang masih perlu dikembangkan supaya bisa bersaing dengan objek wisata lain. Salah satunya ada Desa Cimanggu. Desa Cimanggu merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Desa Cimanggu salah satu desa yang memiliki potensi dalam pariwisata namun belum dikembangkan secara maksimal. Potensi wisata dari Desa Cimanggu yaitu sumber air panas (Nizar, 2021).

Menurut Sekretaris Desa Cimanggu, Ayi Sutarya dalam (Haryanto, 2021) mengatakan bahwa keberadaan mata air panas di Desa Cimanggu telah ada sejak dulu. Akan tetapi memang belum dioptimalkan menjadi destinasi pariwisata. Baru tahun ini, salah satu dari tiga titik mata air panas itu akan dikembangkan menjadi pemandian air panas yang dikelola karang taruna. sebetulnya lahan tersebut mulai digarap sejak delapan tahun lalu untuk dijadikan tempat wisata pemandian air panas, namun ketika itu tidak dilanjutkan lantaran tidak memiliki dana. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Desa Cimanggu, Bapak Asep dalam (Gimnastiar, 2020) yaitu salah satu potensi Desa Cimanggu yaitu Curug Cimanggu, yang belum banyak masyarakat yang mengunjungi. Masih kurangnya pengunjung di wisata Cimanggu, padahal memiliki potensi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Desa Cimanggu demi meningkatkan kekayaan alam dan menambah perekonomian masyarakat Desa Cimanggu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Negamprah Kabupaten Bandung Barat.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahamai fenomena tentang apa yang terjadi oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan sebagainya. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau tulisan dan bahasa, dalam konteks alamiah. Dengan menggunakan penelitian deksriptif kualitatif, maka akan memahami fenomena yang ada secara rinci, mendalam, dan lengkap sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini memahami dan menganalisis fenomena terkait dengan kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam kepada para informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan memberikan sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator pada penelitian ini. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan cara dokumentasi dan observasi (pengamatan) secara langsung di lapangan.

Analisis data menjadi bagian penting sebab sebaik apapun data yang diperoleh jika tidak dianalisis dengan metode yang tepat maka tidak akan dapat memberikan kesimpulan yang baik dan tepat. Proses analisis data ini bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dilakukan dengan cara:

- 1) Pengumpulan data. Pengumpulan data-data mentah dari hasil penelitian, berupa hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.
- 2) Reduksi data yaitu untuk menyingkirkan segala sesuatu (data) yang subyektif untuk menerima data-data yang obyektif, mengklasifikasikan ringkasan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti sehingga mendapatkan kesimpulan.
- 3) Penyajian data (*display data*) yaitu setelah melakukan reduksi data atau penggelompokkan data, maka selanjutnya adalah menyajikan data dalam

bentuk tulisan deskriptif, bisa dalam bentuk tabel, diagram bagan dan lainnya agar mudah dipahami.

Terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi yaitu hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display data*, agar kesimpulan yang disajikan mendapatkan keabsahan data selama penelitian.

## **KERANGKA TEORI**

### **Pengembangan Kapasitas**

Milen (2004) mendefinisikan “kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus”. Berdasarkan penjelasan di atas maka kapasitas merupakan kemampuan baik secara individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sesuai dengan batas kemampuannya. Pengembangan kapasitas berarti meningkatkan kemampuan dari individu, organisasi, dan sistem. Menurut Merilee S. Grindle (Ilato, 2017) *Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance. Capacity building* (pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi. meningkatkan *efficiency, effectiveness, dan responsiveness* kinerja pemerintah. Yaitu *efficiency* dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome, *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yaitu bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Pengembangan kapasitas merupakan proses meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang luas dengan dilakukan pengembangan secara terus menerus dan menjalankan fungsi pokok mereka untuk mencapai tujuan.

Brown (Soeprapto, 2003) mendefinisikan *Capacity building* “sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”. Sedangkan menurut Abdurrahman (2020) pengembangan kapasitas yaitu sebagai “upaya membantu

pemerintah, masyarakat atau individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang dicita-citakan”.

Berkaitan dengan dimensi *capacity building* Morgan dalam (Abdurahman, 2020) mengemukakan bahwa upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) dapat dilaksanakan dalam tiga tingkatan dimensi yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi atau lembaga. Ketiga tingkatan itu adalah: a) Tingkatan sistem b) Tingkatan organisasi/lembaga, dan c) Tingkatan individu/sumber daya manusia.

Dalam pengembangan kapasitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan kapasitas. Menurut (Soeprapto, 2003) faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kelima hal pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Komitmen bersama. Komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan suatu tujuan atau cita-cita. Tanpa adanya komitmen antara pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan suatu program akan berjalan dengan baik apalagi berhasil dengan baik. Karena komitmen sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
- 2) Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan suatu program dari organisasi. Kepemimpinan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program oleh karena itu pemimpin harus memiliki sifat jujur, keterbukaan, penerima masukan atau ide-ide, dan memiliki rasa hormat kepada bawahannya.
- 3) Reformasi peraturan. Reformasi peraturan sangat penting dalam organisasi karena peraturan sangat diperlukan dalam menjalankan suatu program di dalam organisasi. Reformasi peraturan diperlukan sejalan dengan perubahan zaman.
- 4) Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya

menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan indusif dalam menopang program pembangunan.

- 5) Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dalam suatu organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Oleh karena mengakui apa yang menjadi kelemahannya dapat dilakukan perubahan untuk memperbaiki kelemahannya. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki akan dapat diperbaiki bersama agar dapat tercapainya keberhasilan pada suatu program.

### **Pengembangan Desa Wisata**

Wibowo dalam (Robinson, Kiyai and Mambo, 2019) menyatakan bahwa pengembangan merupakan usaha untuk memajukan suatu objek menjadi lebih baik dan mempunyai hasil guna kepentingan bersama. Menurut Anindita dalam (Murni Mustika and Parawangi, 2021) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebih baik dan menarik ditinjau dari segi tempat dan segala yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Aspek pengembangan pariwisata menurut Santoso dalam (Motoh, Laloma and Londa, 2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Atraksi Wisata, yaitu merupakan daya tarik yang timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau, dan lain sebagainya), objek buatan manusia (museum, masjid kuno, dan lain sebagainya), ataupun unsur-unsur budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan lain sebagainya).
- 2) Transportasi merupakan sesuatu yang berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi
- 3) Akomodasi, merupakan salah satu sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
- 4) Fasilitas Pelayanan, yaitu penyediaan fasilitas dan pelayanan yang bervariasi sejalan dengan perkembangan.

- 5) Infrastruktur, yaitu untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pendapat lain mengenai aspek pengembangan pariwisata juga disampaikan oleh Badrudin dalam Sari (2011) yaitu:

- a. *Attraction*, yaitu berupa daya tarik dan dapat digolongkan menjadi *site attraction* dan *event attraction*. *Site attraction* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap, sedangkan *event attraction* merupakan atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah
- b. *Facilities*, berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Wisatawan pasti akan membutuhkan fasilitas seperti penginapan, toko souvenir, restoran, tempat sampah dan lain sebagainya
- c. *Infrastructure*, yaitu infrastruktur dasar dari suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat lokal untuk pengembangan pariwisata
- d. *Transportation*, yaitu berupa moda transportasi baik darat, udara, maupun laut
- e. *Hospitality*, yaitu fasilitas pelayanan berupa keamanan dan perlindungan wisatawan agar merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

## PEMBAHASAN

### Komitmen Bersama

Penguatan atau pengembangan sebuah kapasitas membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Komitmen bersama dalam pengembangan kapasitas pemerintahan desa untuk mewujudkan pembangunan di tingkat desa melalui konsep desa wisata merupakan langkah penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Desa wisata dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup penduduk desa.

Dalam komitmen bersama ini, Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sebagai desa wisata telah melakukan pembentukan

konsorsium yaitu dengan adanya POKDARWIS atau kelompok sadar wisata. Kelompok ini berfokus kepada pengembangan desa wisata berkelanjutan. Pemerintahan desa juga melakukan pemasaran dan promosi dengan memanfaatkan media sosial, situs web dan melalui media sosial seperti youtube. Dalam pengembangan desa wisata ini, terdapat komitmen dari disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yakni pimpinan daerah seperti Bupati Bandung Barat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga pengembangan desa wisata selalu menjadi prioritas.

Keterlibatan masyarakat juga penting dalam pengambilan keputusan dan manajemen desa wisata. Masyarakat harus merasa memiliki dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata. Dalam hal ini, pemerintahan desa tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan wisata yang ada di Desa Cimanggu. Seluruh tempat wisata yang ada di Desa Cimanggu memerlukan partisipasi masyarakat. Semua tempat wisata di Desa Cimanggu tersebut dimiliki oleh pribadi atau perorangan. Hal ini merupakan syarat yang diberikan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Komitmen bersama antar Pemerintah Desa Cimanggu dengan masyarakat desa akan dibuktikan pada tahun 2024, dengan pembangunan 3 objek wisata alam. Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Cimanggu bersama dengan masyarakat desa yaitu dengan cara membangun fasilitas, sarana prasarana menuju objek wisata. Pemerintah Desa Cimanggu berpendapat bahwa dengan infrastruktur yang mendukung, akan mendukung kehadiran pengunjung yang banyak.

### **Kepemimpinan**

Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat adalah suatu desa yang memiliki potensi sebagai desa wisata dengan berbagai kekhasan dan keunikannya. Desa Cimanggu sebagai salah satu desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun pada kenyataannya desa ini belum mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan desa wisata. Kurangnya pembinaan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat di Desa Cimanggu membuat potensi besar tersebut belum maksimal dalam pengelolaannya.



Kepala Desa Cimanggu, Bapak Budi Mulyana yang saat ini sudah menjabat selama kurang lebih 1,5 tahun. Di masa kepemimpinan Kepala Desa Cimanggu ini, sudah dilakukan perencanaan pembangunan objek wisata ke arah yang lebih baik. Kepala Desa Cimanggu melakukan sosialisasi melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Cimanggu yang baru ini, memiliki target di tahun 2024 melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur objek wisata, sedangkan tahun 2025 fokus untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Cimanggu. Desa Cimanggu memiliki potensi yang besar dalam wisata alam. Untuk itu, perlu dimanfaatkan dengan baik, agar pembangunan di desa menjadi lebih baik.

Melalui kepemimpinan Kepala Desa Cimanggu saat ini, mengarahkan semua aparatur Pemerintah Desa Cimanggu memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana, dan mendukung untuk aparatur pemerintah desa untuk selalu mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan desa, terutama pelatihan tentang pengembangan potensi desa atau objek wisata desa. Adanya kapasitas yang memadai dari aparatur pemerintah desa, dan membantu pengembangan desa wisata ke depannya. Untuk itu, Kepala Desa Cimanggu berharap semua bawahannya mau belajar terus untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

Adapun pelatihan yang telah diikuti aparatur pemerintah desa untuk pengembangan desa wisata, salah satunya yaitu pelatihan pemanfaat teknologi informasi, yaitu dengan penggunaan sosial media, website atau youtube, sebagai alat untuk mempromosikan potensi wisata. Pelatihan ini diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### **Reformasi Peraturan**

Reformasi peraturan dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa terutama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa melalui desa wisata merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam hal pengembangan desa wisata ini, Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat seharusnya membuat peraturan tentang penetapan desa wisata. Namun saat ini untuk Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khusus tentang desa

wisata belum ada, yang ada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.

Pemerintah Desa Wisata Cimanggu sendiri, juga belum memiliki peraturan desa tentang desa wisata. Pemerintah Desa menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman untuk pembangunan desa. RPJMDes 2024 Desa Cimanggu telah direncanakan untuk fokus dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Cimanggu. Pembuatan RPJMDes 2024 pun telah melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembuatan dokumen perencanaan ini.

### **Reformasi Kelembagaan**

Reformasi kelembagaan ini dilakukan untuk memastikan pemerintah desa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola, mengawasi dan mengarahkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah desa yang ada di Desa Cimanggu membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif dan kemauan masyarakat sendiri dalam rangka melestarikan obyek dan daya tarik wisata dalam rangka memajukan pariwisata di desa, maka keanggotaan POKDARWIS tidak hanya terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam pariwisata, tetapi juga mereka yang secara tidak langsung ikut mendukung pembangunan di bidang kepariwisataan. Dengan demikian POKDARWIS beranggotakan sebagai berikut: masyarakat yang mata pencahariannya berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar obyek atau daya tarik wisata.

Desa Cimanggu juga disini membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang di mana POKDARWIS ini memang mempunyai fokus untuk pengembangan desa wisata seperti di Desa Cimanggu ini, keberadaan POKDARWIS di Desa Cimanggu ini membantu untuk mengelola wisata-wisata yang ada di Desa Cimanggu walaupun pengelolaannya tidak sepenuhnya sama Pemerintah Desa Cimanggu, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan Desa Wisata Cimanggu. Dalam hal untuk mewujudkan Desa Wisata Cimanggu, POKDARWIS dapat menjaga bahkan meningkatkan koordinasi yang baik dengan perangkat desa, dan masyarakat desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, agar tujuan dari

terbentuknya Desa Wisata di Desa Cimanggu yakni dari, oleh dan untuk masyarakat desa dapat tercapai.

### **Pengawasan tentang Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki**

Pemerintah Desa Cimanggu melakukan pengawasan dan pendampingan karena pengembangan desa wisata ini tentunya harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dan pendampingan ini dilakukan agar pengembangan desa wisata tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Walaupun desa wisata ini tidak dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa, tetapi dengan adanya komitmen bersama ini tentunya pemerintah desa juga memiliki peran penting untuk pengembangan desa wisata bersama para pengelola wisata lainnya. Pengawasan Pokdarwis dilakukan oleh BPD, apapun program Kepala Desa harus seizin BPD.

Kekuatan Desa Cimanggu yaitu memiliki potensi wisata alam yang sangat bagus dan menarik. Adapun objek wisata yang dimiliki oleh Desa Cimanggu yaitu Curug Cimanggu, Pemandian Air Panas dan Pertanian. Jika dimanfaatkan dengan baik, akan bisa seperti tempat wisata seperti Lembang, Ciwidey, Pangalengan yang ada di Jawa Barat.

Kelemahan dari Desa Cimanggu beberapa tempat wisata merupakan aset masyarakat, milik adat bukan milik desa. Untuk itu sulit mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Desa Cimanggu dengan masyarakat desa. Selama ini objek wisata dikelola sendiri oleh masyarakat. Tanpa ada keterlibatan dari Pemerintah Desa Cimanggu. Untuk itu, masih ditemukan permasalahan seperti parkir, toilet umum, akses jalan yang sulit, sampah. Karena selama ini belum ada komunikasi, koordinasi dan keterlibatan dari Pemerintah Desa Cimanggu. Namun, di tahun 2024, Pemerintah Desa Cimanggu telah berkomitmen agar objek wisata yang ada di Desa Cimanggu, menjadi perhatian Pemerintah Desa juga. Selain itu masih kurangnya promosi melalui sosial media ataupun media lainnya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, yaitu belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, sebagai berikut:

1. Komitmen bersama sudah ada dengan dibentuknya Pokdarwis namun belum adanya perhatian penuh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat.
2. Kepemimpinan, dalam Kepemimpinan ini Kepala Desa ikut berkontribusi dalam pengembangan desa wisata.
3. Reformasi Peraturan, sudah ada peraturan mengenai penetapan Desa Wisata dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Namun Pemerintah Desa Cimanggu sendiri belum memiliki regulasi khusus untuk desa wisata.
4. Reformasi kelembagaan, hal ini sudah di dukung dengan dibentuknya Pokdarwis yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif masyarakat untuk melestarikan potensi wisata di Desa Cimanggu.
5. Kekuatan adanya keterlibatan masyarakat Desa Cimanggu dalam pengembangan objek wisata sedangkan untuk kelemahan perlu adanya keseriusan bersama antara Pokdarwis, Pemerintah Desa Cimanggu dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Cimanggu khususnya dalam hal promosi dan pendanaan.

#### REFERENSI

- Abdurahman (2020) *CAPACITY BUILDING, APARATUR SIPIL NEGARA & DEMOCRATIC LOKAL GOVERNANCDE*. Bandung: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI.
- Damayanti, E., Soeaidy, M. S. and Ribawanto, H. (2011) 'STRATEGI CAPACITY BUILDING PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KAMPOENG EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL (Studi di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), pp. 138–155.
- Danny Permana. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.171>
- Gimnastiar, S. (2020) *Tempat Wisata Alam Tersembunyi di Ngamprah yang Belum Tersentuh, bandungbaratpost*. Available at: <https://www.bandungbaratpos.com/tempat-wisata-alam-tersembunyi-di-ngamprah-yang-belum-tersentuh/>.
- Haryanto, A. (2021) *Sumber Air Panas 'Misterius' di Cimanggu Dikembangkan Jadi Daerah Wisata, Sindonews*. Available at: <https://daerah.sindonews.com/read/510466/701/sumber-air-panas-misterius-di-cimanggu-dikembangkan-jadi-daerah-wisata-1628874502>
- Ilato, R. (2017) *Good, Capacity Building Pemerintahan Daerah Menuju Governance*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Kristian, I., & Rochaeni, A. (2022). STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG

- ELEKTRONIK. Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 207-216.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176>
- Milen, A. (2004) *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Bantul: Pembaharuan.
- Motoh, fabiola grasella, Laloma, A. and Londa, very y. (2021) 'Pengembangan Pariwisata Di Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99), pp. 49–57.
- Murni Mustika, E. and Parawangi, A. (2021) 'Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur', 2. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Nizar (2021) *Disparbud KBB Kembangkan Destinasi Wisata Baru*, *jabarekspres.com*. Available at: <https://jabarekspres.com/berita/2021/08/17/disparbud-kbb-kembangkan-destinasi-wisata-baru/>.
- Nuradhawati, R., & Kristian, I. (2022). PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE : STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 29-42.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837>
- Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D., Rusfiana, R., & Rochaeni, A. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(2), 140-150. <https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260>
- Prafitri, G. R. and Damayanti, M. (2016) 'Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)', *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), p. 76. doi: 10.14710/jpk.4.1.76-86.
- Robinson, T. K., Kiyai, B. and Mambo, R. (2019) 'Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara', *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84), pp. 70–82.
- Soeprapto, R. (2003) 'PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE(The Capacity Building For Local Government Toward GoodGovernance)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya*, 11(1).
- Wardani, A. K. and Riyadi, S. (2020) 'Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Budaya di Kabupaten Ciamis', *Jurnal MODERAT*, 6(November), pp. 792–799.
- Yovinus, Y. (2018). QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 1(02), 141-153.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70>
- Yovinus, Y. (2017). MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 86-105.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53>